

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN (Survey Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi)

Noviyanti Josvidar

noviyantiyosvidar@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this research is determine and analyze the influence of government internal monitoring system that consists of controlling environment (X1), risk assessment (X2), controlling activities (X3), information and communication (X4), and monitoring (X5) on the effectiveness of local financial management information system (Y). Analysis tool is multiple linear regressions with ordinary least square (OLS) method. Population consists of the total government regional working units in Sigi Regency and selected 42 units as sample. Respondents are the head of financial and asset who in charge as financial administrator officials in 42 working units. Research instrument is questionnaire and data is analyzed with multiple linear regressions. The conclusion draws that government internal monitoring system that consists of controlling environment, risk assessment, controlling activities, information and communications, and monitoring simultaneously and partially have positive and significant influence on the effectiveness of local financial management information system. From those variables, controlling environment does not have strong influence on the effectiveness of local financial management information system that resulted unqualified opinion from The National Finance Agency in Central Sulawesi.

Keywords: *government internal controlling system and financial SIMDA.*

Sejak Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada pernyataan Standar Akuntansi Nomor 69 pada point 06 disebutkan bahwa Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personel lain entitas

yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) Keandalan pelaporan keuangan; (2) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan ada 8 prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah Basis akuntansi, Nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, Periodisitas, Konsistensi, Pengungkapan lengkap, dan Penyajian wajar.

Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU Nomor 01 Tahun 2004 yang menyatakan kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan

pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Peran Sistem Pengendalian Intern adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, yaitu (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Kegiatan pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; dan (5) Pemantauan.

Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik bila dua unsur, yaitu kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi saling mendukung satu sama lain. Pada sebuah dokumen yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO), dua puluh prinsip kunci (*key principles*) pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan. Teknologi informasi merupakan termasuk di dalam dua puluh prinsip kunci yang merupakan bagian dari Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*). Teknologi informasi – Pengendalian teknologi informasi, bila memungkinkan, didesain dan diimplementasikan untuk mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan.

Secara umum pelaksanaan SPIP di Pemerintah Kabupaten Sigi masih belum optimal. Gambaran ini dapat dilihat opini yang diberikan BPK terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi. Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah tahun 2011 – 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2015

No	Tahun LK	Opini
1	2010	WDP
2	2011	WTP – DPP
3	2012	WTP
4	2013	WDP
5	2014	WDP

Sumber : BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, 2016

Salah satu hal yang menjadi pokok pertimbangan dalam pemberian opini tersebut adalah kelemahan SPIP. Kelemahan SPIP antara lain tahun 2011 dengan opini WDP pokok-pokok kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi bahwa masih terdapat prosedur teknis teknis pengelolaan keuangan daerah yang belum ditetapkan serta pengelolaan keuangan daerah itu sendiri masih belum tertib. Pada tahun 2012 memperoleh opini WTP – DPP menemukan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi bahwa organisasi pengelola keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tidak ditetapkan secara memadai dan penatausahaan aset tetap tidak tertib. Pada tahun 2013 dengan opini WTP menemukan pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi bahwa persediaan belum ditatausahakan dengan tertib dan belanja bantuan hibah dan bantuan sosial belum dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2014 mendapat opini WDP yang menjadi pokok-pokok kelemahan SPI atas Laporan Keuangan bahwa penatausahaan Aset Tetap belum memadai dan penganggaran belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tidak sesuai dengan SAP. Sedang pada tahun 2015 sekali lagi mendapat opini WDP, BPK RI menemukan pokok-pokok kelemahan SPI bahwa penatausahaan Aset Tetap kurang memadai, pengendalian dan penatausahaan Belanja Kegiatan Tanggap Darurat tidak memadai dan yang paling serius adalah Pemerintah kabupaten Sigi belum sepenuhnya siap menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua.

Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalisasi manajemen daerah, saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA Keuangan ialah (1) menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2) menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen, pemerintah dapat gunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4) memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi”.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila lingkungan pengendalian menunjukkan kondisi baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko terkait dengan aktivitas entitas mengidentifikasi dan mengelola risiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian risiko, setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan Pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang handal dapat memberikan informasi terkait operasional, keuangan serta perbandingan informasi dalam organisasi. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi dan seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan.

5. Pemantauan

Merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera dilanjutkan. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Efektivitas

Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan

untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya (Mardiasmo, 2009).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja (2009) dalam Budiman dan Arza (2013), aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi *database* yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu, pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA Keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai acuan SIMDA Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap efektivitas SIMDA Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah baik secara simultan dan parsial terhadap efektivitas SIMDA Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh

signifikan terhadap efektivitas SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi

2. Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi
3. Penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.
4. Kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi
5. Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi
6. Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey. Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2006: 7) mengemukakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta menggunakan data numerik (angka), yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi yang berjumlah 42 SKPD. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus. Reponden yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan dan Aset sebagai PPK SKPD.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari: Lingkungan

pengendalian (X_1), Penilaian risiko (X_2), Kegiatan pengendalian (X_3), Informasi dan komunikasi (X_4) dan Pemantauan (X_5) serta variabel terikat yaitu Efektivitas SIMDA Keuangan (Y). Defenisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (X_1)
Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan keuangan akan sangat berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Lingkungan pengendalian yang sehat akan menimbulkan perilaku positif dan konklusif serta manajemen yang sehat pula.
2. Penilaian risiko (X_2)
Penilaian risiko dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul.
3. Kegiatan pengendalian (X_3)
Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi (X_4)
Penerapan informasi yang tepat serta komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal akan menunjang pengelolaan keuangan secara baik.
5. Pemantauan (X_5)
Pemantauan adalah untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern pengelolaan keuangan secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari selain itu juga dilaksanakan pemantauan secara berkala dalam rangka perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi.
6. Efektivitas SIMDA Keuangan (Y)
Pengukuran efektivitas SIMDA Keuangan diadopsi dari penelitian Sri Dewi (2009).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Lingkungan pengendalian (X_1), Penilaian risiko (X_2), Kegiatan pengendalian (X_3), Informasi dan komunikasi (X_4), dan Pemantauan (X_5) terhadap variabel terikatnya yaitu Efektivitas SIMDA Keuangan (Y). Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$
 Dimana:
 Y = Efektivitas SIMDA Keuangan
 α = Intersep (Konstanta)
 b_1 - b_5 = Koefisien Regresi
 X_1 = Lingkungan Pengendalian
 X_2 = Penilaian Risiko
 X_3 = Kegiatan Pengendalian
 X_4 = Informasi dan komunikasi
 X_5 = Pemantauan
 e = Kesalahan pengganggu (*error term*)
3. Pengujian Hipotesis
pengujian terhadap p hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda. Adapun dalam proses analisisnya menggunakan bantuan komputer *SPSS For Windows Release 16.0* dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Regresi Berganda
Dependen Variabel Y=Efektivitas SIMDA Keuangan

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T	Sig
Constanta	0,811	0,245	3,312	0,002
X ₁ : Lingkungan Pengendalian	0,109	0,032	3,417	0,002
X ₂ : Penilaian Risiko	0,208	0,066	3,140	0,003
X ₃ : Kegiatan Pengendalian	0,219	0,053	4,151	0,000
X ₄ : Informasi dan Komunikasi	0,139	0,051	2,739	0,010
X ₅ : Pemantauan	0,209	0,055	3,827	0,000
R- = 0,910				
R-Square = 0,828 F-Statistik = 34,615				
Adjusted R-Square = 0,804 Sig. F = 0,000				

Sumber : Hasil Regresi

Persamaan yang diperoleh dari proses analisis adalah sebagai berikut :

Model regresi

$$Y = 0,811 + 0,109X_1 + 0,208X_2 + 0,219X_3 + 0,139X_4 + 0,209X_5$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk nilai constanta sebesar 0,811 berarti efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 0,811.
2. Lingkungan pengendalian (X₁) dengan koefisien regresi 0,109 ini berarti terjadi pengaruh positif antara lingkungan pengendalian dan efektivitas SIMDA keuangan. Artinya semakin baik lingkungan pengendalian yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin efektif SIMDA keuangan.
3. Penilaian risiko (X₂) dengan koefisien regresi 0,208 ini berarti terjadi pengaruh positif antara penilaian risiko dan efektivitas SIMDA keuangan. Artinya semakin baik penilaian risiko yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin efektif SIMDA keuangan.
4. Kegiatan pengendalian (X₃) dengan koefisien regresi 0,219 ini berarti terjadi pengaruh positif antara kegiatan pengendalian dengan SIMDA keuangan. Artinya semakin baik kegiatan pengendalian yang ada di Pemerintah

Kabupaten Sigi maka akan semakin efektif SIMDA keuangan.

5. Informasi dan komunikasi (X₄) dengan koefisien regresi 0,139 ini berarti terjadi pengaruh positif antara informasi dan komunikasi dengan efektivitas SIMDA keuangan. Artinya semakin baik informasi dan komunikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin efektif SIMDA keuangan.
6. Pemantauan (X₅) dengan koefisien regresi 0,209 ini berarti terjadi pengaruh positif antara pemantauan dengan efektivitas SIMDA keuangan. Artinya semakin baik pemantauan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin efektif SIMDA keuangan.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni lingkungan pengendalian (X₁), penilaian risiko (X₂), kegiatan pengendalian (X₃), informasi dan komunikasi (X₄) serta pemantauan (X₅) dengan variabel tidak bebasnya efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai Adjusted R-Square = 0,804. Hal ini berarti bahwa sebesar 80,40% variabel tidak bebas

dipengaruhi oleh kelima variabel bebas, selebihnya 19,40% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 34,615$ pada taraf $\alpha = 0,05$ atau $\alpha > 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa signifikansi $F = 0,000$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: “secara simultan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi”. Berdasarkan hasil Uji-F ternyata *terbukti*.

b. Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam

1. Lingkungan pengendalian (X_1)

Untuk variabel lingkungan pengendalian, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,109, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,002. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: “secara parsial lingkungan pengendalian berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi”. Berdasarkan hasil uji-t ternyata *terbukti*.

2. Penilaian risiko (X_2)

Untuk variabel penilaian risiko, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,208, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,003. Dengan demikian nilai $t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel

penilaian risiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: “secara parsial penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi”. Berdasarkan hasil uji-t ternyata *terbukti*.

3. Kegiatan pengendalian (X_3)

Untuk variabel kegiatan pengendalian, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,219, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kegiatan pengendalian mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi. Dengan demikian, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa: “secara parsial kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi”. Berdasarkan hasil uji-t ternyata *terbukti*.

4. Informasi dan komunikasi (X_4)

Untuk variabel informasi dan komunikasi, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,139, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,010. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi. Dengan demikian, maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa: “secara parsial informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi”. Berdasarkan hasil uji-t ternyata *terbukti*.

5. Pemantauan (X_5)

Untuk variabel pemantauan, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai

koefisien regresi sebesar 0,209, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pemantauan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi. Dengan demikian, maka hipotesis keenam yang menyatakan bahwa: “secara parsial pemantauan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi”. Berdasarkan hasil uji- t ternyata *terbukti*.

Penelitian ini menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi, dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Terhadap Efektivitas SIMDA Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan memiliki pengaruh simultan terhadap efektivitas SIMDA keuangan. Menurut Mulyadi (2001:163) mengatakan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern harus dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern.

Diterimanya hipotesis yang pertama ini sekaligus mendukung teori yang diungkap Weygent et al (2005) dalam Herawati (2014) mengungkapkan bahwa jika suatu pengendalian intern telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam

sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap) dan dapat diaudit.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi.

2. Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Efektivitas SIMDA Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan satuan kerja yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sigi telah melaksanakan kegiatan yang dapat digunakan untuk membangun lingkungan pengendalian yang kondusif. Untuk mendapatkan lingkungan pengendalian yang baik diperlukan adanya pemenuhan sub unsur:

1. Penegakan integritas dan nilai-nilai etika secara eksplisit atau nyata diwujudkan dalam rangka menegakkan tindakan disiplin melalui kode etik keprofesiannya, nilai –nilai etika yang berlaku umum di masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, melalui penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi serta menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pengendalian memerlukan adanya pemimpin yang kondusif, dimana pimpinan tahu kapan harus menjadi pemimpin yang memberikan arahan kepada bawahannya, dan kapan harus menjadi tempat yang tetap bagi bawahannya untuk mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapinya.
4. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilakukan dengan memberikan Surat Tugas dan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia melalui pelaksanaan diklat-diklat penjenjangan ataupun pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pengelola keuangan yang efektif dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi.
7. Peran APIP yang efektif dapat terwujud bila auditor APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian, anggaran dan aset daerah.
8. Kerjasama dengan instansi-instansi terkait dapat dibangun melalui suatu koordinasi antar instansi. Mekanisme koordinasi dapat dibangun melalui pemilihan tugas dan kewenangan masing-masing instansi dan kemudian mengidentifikasi keterkaitan tersebut sebagai butir-butir yang akan dikoordinasikan.

Penegakan lingkungan pengendalian ini merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern sebagaimana yang disampaikan oleh Konrath (1999) dalam Agoes (2004), serta perumpamaan sebagai payung oleh Arens (2011) yang memayungi keseluruhan komponen lainnya dalam suatu entitas dan menetapkan kerangka kerja untuk mengimplementasikan pengendalian intern dan sistem akuntansi.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi.

3. Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Efektivitas SIMDA Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah melakukan penilaian risiko namun belum maksimal, karena hanya melakukan identifikasi risiko tetapi belum sepenuhnya menganalisis risiko yang telah diidentifikasi untuk mengetahui dampak dan cara mengatasinya. Menurut Utoyo (2011) dalam Hindriani (2012), untuk dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi diperlukan adanya penyatuan Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Pencegahan Kecurangan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi.

4. Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Efektivitas SIMDA Keuangan

Hasil penelitian atas kegiatan pengendalian pada Pemerintah Kabupaten Sigi diketahui belum dilaksanakan secara optimal antara lain:

- 1) Reviu atas kinerja pada 42 SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi sebatas formalitas untuk memenuhi kebutuhan permintaan data oleh DPPKAD.
- 2) Pembinaan SDM dengan memberikan *rewards* berupa promosi dan mengikuti pendidikan / pelatihan yang ditawarkan / direncanakan dalam program / kegiatan di intern SKPD. Dan *punishment* berupa sanksi oleh atasan langsung ataupun melalui pemanggilan langsung dari Inspektorat.
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh satu seksi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jaringannya dan sebagai pengelola digunakan operator secara khusus untuk menjalankannya dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi.
- 4) Pengendalian atas barang persediaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.

- 5) Pengendalian fisik atas aset hasil pengadaan belanja barang maupun belanja modal belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.
- 6) Pencatatan atas setiap kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan akurat dan berdasarkan pengukuran yang benar.
- 7) Pemerintah Kabupaten Sigi belum sepenuhnya siap menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akutual.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi.

5. Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas SIMDA Keuangan

Hasil penelitian atas informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Sigi telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan berupa aplikasi SIMDA keuangan. Menurut Yuwono, dkk (2005) dalam Hindriani (2012), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik *double entry* yang bertujuan untuk informasi yang reliabel. Sehingga dapat menghadapi risiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dengan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis kelima yang menyatakan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi.

6. Pengaruh Pemantauan Terhadap Efektivitas SIMDA Keuangan

Hasil penelitian atas pemantauan di Pemerintah Kabupaten Sigi diselenggarakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sinamo (2010:24) dalam Hindriani (2012) mengartikan pemantauan

sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya.

Unsur-unsur pemantauan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut di atas, antara lain:

- 1) Pengawasan melekat, adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung dari masing-masing satuan kerja terhadap kinerja dari personil/staf sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiharto (2008:13) dalam Hindriani (2012) bahwa pengawasan melekat (*built in control*) adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Pengawasan oleh APIP, yaitu pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi.
- 3) Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif (DPRD).

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis keenam yang menyatakan bahwa pemantauan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan di Pemerintah Kabupaten Sigi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, pemantauan secara bersama-sama dapat berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.

- 2) Lingkungan pengendalian berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.
- 3) Penilaian risiko berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.
- 4) Kegiatan pengendalian berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.
- 5) Informasi dan komunikasi berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.
- 6) Pemantauan berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas SIMDA keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar dari semua unsur pengendalian intern dengan penegakan disiplin dan tata kelolanya memiliki porsi pengaruh yang paling kecil sebagai komponen yang paling utama dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini berarti bahwa Lingkungan Pengendalian tidak memiliki pengaruh yang kuat atau lemah dalam menciptakan LKPD yang berkualitas di Pemerintah Kabupaten Sigi.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, bagi Pemerintah Kabupaten Sigi agar dapat meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik, dimana dalam keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kesalahan-kesalahan

dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dikurangi sampai batas minum.

- 2) Tantangan yang dihadapi adalah penilaian secara utuh penerapan SPIP di Pemerintah Kabupaten Sigi pada sub variabel atau unsur lainnya masih perlu dilakukan, sehingga dapat terbaca secara menyeluruh penerapan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.
- 3) Rata-rata tanggapan responden pada penelitian ini sudah baik. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sigi dapat mempertahankan tanggapan responden tersebut. Namun masih ada nilai tanggapan responden yang reratanya masih rendah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sigi dapat meningkatkan pencapaian tersebut.
- 4) Bagi penelitian selanjutnya, wilayah penelitian bisa diperluas tidak hanya di Kabupaten Sigi, menambah jumlah responden penelitian, seperti PPTK dan Bendahara Pengeluaran serta menggunakan metode deskriptif kualitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ridwan, SE.,M.Si.,Ak.,C.A selaku Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Vitayanti Fattah, SE., M.Si selaku Anggota Tim Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan masukan dan petunjuk dalam proses pembimbingan selama ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arens, Alvin A. 2011. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu*. Terjemahan Desti Fitriani. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2011 - 2015

- Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013. Pendekatan Technology Accetance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA*. Vol. 1 No. 1 Universitas Negeri Padang.
- Herawati, Tuti. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study & Accounting Research*. Vol. XI, No. 1 – 2014. ISSN: 1693 – 4482.
- Hindriani, Nuning. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Jurnal Wacana*. Vol 15. No. 3
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung .
- Sukrisno, Agoes. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*. Jilid 2. Edisi Ketiga. Jakarta: FE-UI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.